

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada bagaimana cara daerah tersebut mengelola keuangannya. Berdasarkan aturan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diterangkan bahwa keuangan daerah meliputi semua sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah, baik berupa uang maupun aset lainnya. Sumber daya ini digunakan untuk menjalankan kewajiban daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, diperlukan sistem yang jelas, terorganisir, dan terukur. Setiap langkah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengadopsi dari tata kelola yang baik adalah keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan masyarakat dan keadilan. Dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam setiap proses, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih proaktif dalam pembangunan daerah (Defitri, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 telah merumuskan secara rinci tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan yang berbasis pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Setiap tahapan dalam proses ini memiliki tujuan yang spesifik, yaitu untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan transparansi sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik. Tujuan dari penerapan tahapan-tahapan tersebut adalah agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* (Hermelinda, 2018).

Dengan demikian, Pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola dana desentralisasi serta dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ini diinginkan dapat selaras dengan tujuan pembangunan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dari sudut pandang masyarakat, perkembangan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik akan memicu permintaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Urusan ini menjadi rintangan bagi pemerintah demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, khususnya dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat (Rondonuwu et al., 2019).

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan suatu sistem yang menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, satu di antaranya dengan cara penerapan pemerintah elektronik atau e-government. Implementasi e-government bertujuan agar mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menyediakan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Selain itu, e-government juga berupaya memperlancar komunikasi antara lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, dan melibatkan kontribusi masyarakat secara luas. Penerapan e-government berperan penting dalam mengarahkan masyarakat menuju era informasi. Melalui e-government, pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan digital, yaitu ketertinggalan dalam perkembangan global yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan informasi (Wilansari, 2022).

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan, SIPD merupakan suatu sistem informasi yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah. SIPD ini berfungsi untuk mengelola dan menyajikan berbagai data penting seperti data pembangunan, keuangan, dan informasi pemerintahan lainnya guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan

informasi di lingkungan pemerintah daerah. SIPD mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang hingga pengawasan pelaksanaan program. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, SIPD memfasilitasi pemerintah daerah dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang komprehensif, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data (Seputra, 2020).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan., Kota Jambi, Jambi 36122. Merupakan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pendapatan Provinsi Jambi. Tugas ini meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan kas, pencatatan keuangan, dan pembuatan laporan keuangan. Sejak tahun 2021, BPKPD Provinsi Jambi telah mengadopsi sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi jambi Tahun 2019 - 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan
2019	1.651.689.944	4,35%
2020	1.535.183.487	-0,51%
2021	1.601.141.999	3,70%
2022	2.163.585.920	5,12%
2023	1.934.290.618	4,66%

Sumber : <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM4IzI>

Melalui implementasi SIPD, Provinsi Jambi berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan baru, menyusun strategi penggalan potensi secara lebih efektif, serta memantau realisasi pendapatan secara real-time. Dengan penggunaan data yang akurat dan real-time, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi pendapatan yang sebelumnya tidak terkelola secara optimal, serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi. Hal ini bukan hanya berperan pada peningkatan PAD, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Kinerja pegawai memiliki peranan penting bagi organisasi, apabila kinerja yang ditampilkan pegawai rendah maka akan mengakibatkan organisasi dalam mencapai tujuan menjadi terhambat. Kinerja didefinisikan sebagai capaian hasil kerja pegawai, yang diukur berdasarkan parameter kualitas dan kuantitas, dalam rentang waktu yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan deskripsi tugas serta tanggung jawab. Pencapaian tujuan organisasi secara optimal hanya dapat direalisasikan apabila sumber daya manusia dalam institusi tersebut dikelola melalui manajemen sumber daya manusia yang tepat sasaran. Faktor sumber daya manusia, sebagai faktor produksi yang memiliki karakteristik berbeda dari faktor lainnya, memiliki sifat unik, dinamis, serta dilengkapi dengan kapasitas rasional dan emosional, aspirasi, dan personalitas yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan yang bersifat individual (Prayogi et al., 2019).

Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seringkali menjadi sorotan, meskipun seharusnya mereka bekerja dengan optimal. Hal ini tercermin dari berbagai aspek, seperti kuantitas dan kualitas kerja, efisiensi waktu, kolaborasi, dan kehadiran. Masalah kualitas dan kuantitas kerja muncul karena sebagian pegawai belum sepenuhnya menguasai tugas mereka, yang berakibat pada pekerjaan yang tidak efektif dan efisien. Sementara itu, masalah efisiensi waktu disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar waktu yang berlaku, serta adanya pandangan bahwa faktor waktu kurang penting dalam pekerjaan pemerintah.

Studi yang dilakukan oleh Nasution (2021) menyimpulkan bahwa kendala dalam pengembangan perangkat lunak SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan faktor utama yang menyebabkan berbagai masalah operasional, seperti error sistem, ketidaksesuaian data, dan kurangnya koordinasi antar pengguna. Akibatnya, kualitas data yang dihasilkan menjadi diragukan dan laporan yang dihasilkan pun tidak konsisten. Kondisi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan berakibat pada inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain masalah yang sudah disebutkan, SIPD juga mengalami kendala dalam mengelola anggaran, seperti penundaan pergeseran anggaran dan hambatan dalam sistem penggajian. Proses pembuatan dokumen

keuangan seperti SPD, SPJ, dan SP2D pun menjadi tidak efisien. Padahal, SIPD diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pusat dalam pengambilan keputusan (Bustanuddin, 2023). SIPD dirancang untuk menunjang terciptanya sistem dan informasi keuangan serta laporan pemerintahan lain yang hasilnya (output) dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

Tabel 1. 2 Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

No	Pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Jabatan
1	Kepala Badan (kaban) Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran (PA)
2	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4	Kepala Bidang Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sumber : <https://bakeuda.jambiprov.go.id/dokumen/kategori/7>

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat penting bagi pegawai yang mengelola anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan daerah secara lebih efisien dan transparan. Selain mempermudah pekerjaan administratif, SIPD memberikan data terkini yang sangat berguna bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan penting. Hal ini mendukung upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai instrumen yang tidak dapat dipisahkan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi kunci dalam pelaksanaan tugas para pengelola anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,

implementasi penuh SIPD di seluruh instansi pemerintah di Provinsi Jambi, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, menjadi keharusan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selama menjalankan kebijakan tersebut, efektivitas implementasi SIPD di BPKPD Provinsi Jambi dinilai belum efektif dan efisien dalam pengoperasiannya, dimana dilihat dari belum sempurnanya aplikasi SIPD dikarenakan sistem yang masih tergolong baru dan masih terdapat kekurangan dalam berbagai aspek yang masih dalam tahap pengembangan.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, resistensi dari pegawai, dan kendala teknis. Kondisi ini menghambat optimalisasi pemanfaatan SIPD, sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, proses pencatatan transaksi keuangan menjadi tidak efisien, pelaporan keuangan menjadi terlambat, dan potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran semakin besar.

Hasil penelitian Tumija dan Erlambang (2023) menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini terbukti dari dampak positif yang dirasakan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan anggaran. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Namun demikian, belum terdapat kajian empiris yang secara komprehensif mengukur kontribusi SIPD terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak jelas bahwa diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap potensi dan tantangan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam

hubungan antara penerapan SIPD dan kinerja BPKPD Provinsi Jambi dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Fokus utama penelitian ini adalah pada tiga aspek penting, yaitu peningkatan efisiensi, peningkatan akurasi data, dan penyusunan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh efektivitas implementasi SIPD dan kinerja pegawai terhadap proses pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Provinsi Jambi.
2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Provinsi Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas implementasi SIPD dan kinerja pegawai terhadap proses pengelolaan keuangan daerah pada BPKPD Provinsi Jambi.
2. Mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan BPKPD Provinsi Jambi untuk meningkatkan efektifitas SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara akademik
Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, khususnya dalam konteks SIPD.
2. Manfaat secara praktis
Penelitian ini diharapkan mampu membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penerapan SIPD dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.